



**buletin**  
**tanjidor**

**DARI REDAKSI**

**Salam Tanjidor!** Pembaca setia Buletin Tanjidor sekalian, semoga senantiasa di berikan kesehatan oleh Allah SWT, disini kami akan memberikan berbagai informasi edisi Triwulan ketiga (Juli s.d September 2024), yaitu mengenai kegiatan-kegiatan teknis maupun non teknis di BPK Perwakilan DKI Jakarta.

Kami mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan kritik dan sarannya agar Buletin dapat terus memberikan informasi lebih baik dan akurat

” Akhir kata kami sampaikan terima kasih, **Salam Tanjidor**

**Daftar Isi :**

1. Upacara Peringatan HUT ke- 79 Kemerdekaan Republik Indonesia
2. Rangkaian Kegiatan Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79 di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. BPK Perwakilan DKI Jakarta Rayakan Idul Adha 2024 dengan Penyembelihan Hewan Kurban
4. PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023
5. BPK SAMPAIKAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA SATU DEKADE TERAKHIR PADA PENYERAHAN LHP LKPP DAN IHPS II 2023 KEPADA PRESIDEN

- Pengarah: **Ayub Amali (Kalan)**
- Penanggung Jawab: **Ahmad Havid (Kasetlan)**
- Ketua Tim Redaksi: **Kautsar Aditya Wicaksana (Kasubbag Humas)**
- Tim Redaksi:
  1. **Andi Ferdiansyah**
  2. **Marlina Kantiningtyas**
  3. **Nunik Anggraeni**
  4. **Subhan**

**BERITA UTAMA**

1



**Upacara Peringatan HUT ke-79  
Kemerdekaan Republik INDONESIA**

**Jakarta – Sabtu, 17 Agustus 2024.** BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan kantor. Tema peringatan kemerdekaan RI tahun ini adalah “Nusantara Baru Indonesia Maju” merefleksikan semangat bangsa Indonesia yang sedang bertransisi, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Ayub Amali dan Komandan Upacara Kepala Sub Auditorat DKI II Rusdiyanto. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan memberikan penyematan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada para pegawai lingkungan BPK Perwakilan DKI Jakarta yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 Tahun.

Dalam amanatnya Inspektur Upacara membacakan pidato Ketua BPK RI pada acara Peringatan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya Ketua BPK menyatakan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan ini marilah kita maknai dengan kontribusi nyata melalui peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan untuk mencapai tujuan negara. BPK telah memberikan serangkaian sumbangsih nyata melalui pelaksanaan mandatnya. Setiap tahunnya, tak terkecuali di tahun ini, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta badan lainnya tahun 2023, yang secara umum telah menunjukkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang baik. Selain itu, BPK juga telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang mengungkapkan temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara pada tahun-tahun sebelumnya.

# Rangkaian Kegiatan Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79 di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta



Semangat dan keceriaan terpancar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta saat pembukaan perayaan HUT RI Ke-79 dan Tasyakuran Kemerdekaan RI Ke-79. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Ayub Amali mengungkapkan rasa syukur dan harapannya melalui perayaan HUT RI Ke-79 dengan tema "Nusantara Baru Indonesia Maju" dapat memberikan semangat kepada para pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kepala Sub Auditorat DKI III, Hari Fitrianto, selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan rangkaian kegiatan perayaan HUT RI ke-79. Rangkaian kegiatan lomba antara lain Defile Kontingen, Pertandingan Badminton, Tenis Meja, Gaple Domino, Donor Darah, Fun Games, Lomba Masak, Lomba Vocal Group, Lomba Karaoke, Lomba Senam,

Bazaar DWP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Upacara Peringatan HUT-RI Ke-79 dan Tasyakuran Kemerdekaan RI Ke-79. Seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan HUT RI ke-79 tahun diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dari pimpinan hingga cleaning service. Rangkaian kegiatan berakhir dalam acara Tasyakuran Kemerdekaan RI Ke-79 pada Senin, 19 Agustus 2024. Semoga semangat Kemerdekaan RI ke-79 selalu menyala di dalam hati kita, menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera.



## BPK Perwakilan DKI Jakarta Rayakan Idul Adha 2024 dengan Penyembelihan Hewan Kurban

**Jakarta, 19 Juni 2024** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menyelenggarakan acara penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 H. Acara yang berlangsung di samping lobby lantai dasar ini dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional, tim juru sembelih halal Arrayyan Srengseng Sawah Jagakarsa, serta seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kegiatan tahun ini, Masjid Baitul Hasib Menara MTH 34 BPK Perwakilan DKI Jakarta menyembelih sebanyak 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Daging kurban dibagikan kepada para shohibul kurban, cleaning servis, para pegawai PTT BPK Perwakilan DKI Jakarta, warga Cikoko RW 2 RT 1-10, serta beberapa security gedung menara hijau, PT Tancho, PT Grafica, polsek, koramil dan babinsa setempat.

Penyembelihan hewan Kurban dilaksanakan oleh Tim Juru Sembelih Halal yang diketuai oleh H. Ikhwan Batubara. Proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan memperhatikan aspek kebersihan dan kesejahteraan hewan. Acara ini diawali dengan laporan kegiatan dari Ketua DKM MBH Menara MTH 34, Muh. Khamim, sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Ayub Amali dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban.

Para pegawai BPK Perwakilan DKI Jakarta yang hadir turut menyambut acara ini dengan antusias dan menyaksikan acara penyembelihan hewan kurban hari raya Idul Adha 1445 H. Masjid Baitul Hasib Menara MTH 34 BPK Perwakilan DKI Jakarta secara rutin membuka program tabungan kurban dan infaq operasional kurban bagi para jamaah. Dana Operasional penyembelihan Kurban menggunakan infaq operasional kurban yang dikumpulkan setiap bulan dari para jamaah.

Dengan diseleggarakannya acara ini, BPK Perwakilan DKI Jakarta berharap semoga kedepannya semakin banyak lagi pegawai yang dapat berkorban di Menara MTH 34, sehingga dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dikalangan pegawainya. Hari Raya Idul Adha tahun 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.





## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

**Jakarta, Kamis (25 Juli 2024)** – BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin dan Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Acara bertempat di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan atas LKPD dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat UUD 1945, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin dan dihadiri antara lain oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Auditor Utama Keuangan Negara V, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta segenap jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit, menyampaikan bahwa Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan. Pemberian opini tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan BPK yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengatur juga bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah daerah disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Aset Tetap Tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang, dan penyelesaian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berlarut-larut.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama;
3. Kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda;
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat.
5. Penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan termasuk juga rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kalinya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

BPK berharap agar hasil pemeriksaannya dapat memberikan dorongan untuk terus menjaga dan menyempurnakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.





## BPK SAMPAIKAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA SATU DEKADE TERAKHIR PADA PENYERAHAN LHP LKPP DAN IHPS II 2023 KEPADA PRESIDEN

JAKARTA, Humas BPK – Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Ketua BPK Isma Yatun menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 kepada Presiden dihadiri oleh kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

“Momen ini memberikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya,” kata Ketua BPK dalam sambutannya pada penyerahan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS II tahun 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Senin (8/7)



Selain itu, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.

“Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik,” jelasnya.

Menurut Ketua BPK, hal ini adalah landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.

“Untuk itu, terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir,” ungkap Ketua BPK.

Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa bahwa WTP bukan prestasi, akan tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.

“Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Pada kesempatan ini, Presiden menekankan beberapa hal, di antaranya melanjutkan reformasi struktural, lanjutkan sinkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien, agar pemerintahan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.

Menutup sambutannya, Presiden berharap BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.

“Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kedepan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.